

## **PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR**

**Isti Permatasari**

Isti\_permata@yahoo.com

**Titik Mildawati**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to test whether income of region that consist of Local Own Source Revenues (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH) have an influence to the Capital Expenditure in the districts / cities in East Java province in 2010-2014 periods. The samples are 38 districts / cities in East Java province. The data is in the form of secondary data which has been obtained from the realization of Local Government Budget (APBD) report of districts / cities in East Java province and the observation is in 2010-2014 periods that have been obtained from the Statistics Indonesia (BPS) of East Java Province. The data analysis instrument that has been employed in this research is Multiple Linear Regressions Analysis. Based on the result of the test, it shows that 1) Local Own Source Revenues has positive influence to the Capital Expenditure; 2) General Allocation Fund has positive influence to the Capital Expenditure; 3) Special Allocation Fund has positive influence to the Capital Expenditure. 4) Profit Sharing Funds has positive influence to the Capital Expenditure. The result of this research has positive effect, it indicates when PAD, DAU, DAK, and DBH variables are getting high, and so the allocation of Capital Expenditure is getting high as well.*

*Keywords: Local Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), Capital Expenditure*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur dengan periode observasi tahun 2010-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier Berganda. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini berpengaruh positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH maka alokasi Belanja Modal juga semakin tinggi.

Kata-kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal.

## PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah.

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk program pembangunan berbagai fasilitas publik. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas guna meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi untuk para investor. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan harus mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya (Nuarisa, 2012).

Namun desentralisasi fiskal memiliki dua sisi penilaian, disatu sisi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah. Akan tetapi desentralisasi fiskal juga menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Adi (2005) menyatakan bahwa terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini dikarenakan, daerah yang kaya akan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah (PAD) yang semakin besar sehingga daerah akan semakin maju, yang tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang (Santosa dan Rofiq, 2013). Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan berupa dana perimbangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Adi (2006) berpendapat bahwa proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harianto dan Priyo (2007) menyatakan bahwa tingginya proporsi dana perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2006).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang belanja modal diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Penelitian ini mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Serta DAU yang berpengaruh positif dan signifikan pula terhadap belanja modal. Begitu pula yang dipaparkankan oleh Santosa dan Rofiq (2013) menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2013) berpendapat bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Setiyani (2009) berpendapat bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sumarmi (2009) berpendapat bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Karena hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, peneliti akan menguji kembali tentang pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Nuarisa (2012) tentang pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah dengan menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen. Penelitian ini akan meneliti pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal pada seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur serta periode observasi pada tahun 2010-2014.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dirumuskan pada penelitian ini adalah (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal? (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal? (3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal? (4) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. (2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. (3) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. (4) Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Anggaran Daerah**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu (1) Anggaran operasional, merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan. (2) Anggaran modal, merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Yuwono, et al. (2005) APBD meliputi (1) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, (2) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, (3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, menyatakan APBD berfungsi sebagai (1) Fungsi otorisasi (2) Fungsi perencanaan (3) Fungsi pengawasan (4) Fungsi alokasi (5) Fungsi distribusi (6) Fungsi stabilisasi

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33/2004). Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Soekarwo, 2003). Pendapatan Asli Daerah menurut Putro dan Pamudji (2010) dapat dirumuskan sebagai berikut:  
$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Laba Perusahaan Daerah} + \text{Pendapatan Lain-lain yang Sah}$$

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Walidi (2009) menyatakan bahwa DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralkan ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

Berpedoman terhadap PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, DAU adalah untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. *Horizontal equity* adalah kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sedangkan yang menjadi kepentingan daerah yakni *sufficiency* (kecukupan) terutama adalah untuk menutupi *fiscal gap*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Pembagian DAU

berdasarkan bobot masing-masing daerah, yang ditetapkan atas kebutuhan masing-masing wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Menurut Putro dan Pamudji (2010) dan UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$

Keterangan:

$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$

$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{Total Pengeluaran Rata-rata (Indeks Jumlah Penduduk} + \text{Indeks Wilayah} + \text{Indeks Pembangunan Manusia} + \text{Indeks Kemahalan Konstruksi)} + \text{Indeks PDRB per kapita}$

$\text{Kapasitas Fiskal} = \text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil (PBB} + \text{BPHTB} + \text{PPH} + \text{SDA)}$

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Darise (2008) berpendapat bahwa DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis. Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap kabupaten/kota berasal dari bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Usman et al, 2008):

$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$

Yang mana penentuan Bobot Daerah dengan rumus:

$\text{Bobot Daerah} = \text{Indeks Fiskal dan Wilayah} \times \text{Indeks Kemahalan Konstruksi}$

Sedangkan Bobot Teknis dihitung dengan rumus:

$\text{Bobot Teknis} = \text{Indeks Teknis} \times \text{Indek Kemahalan Konstruksi}$

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

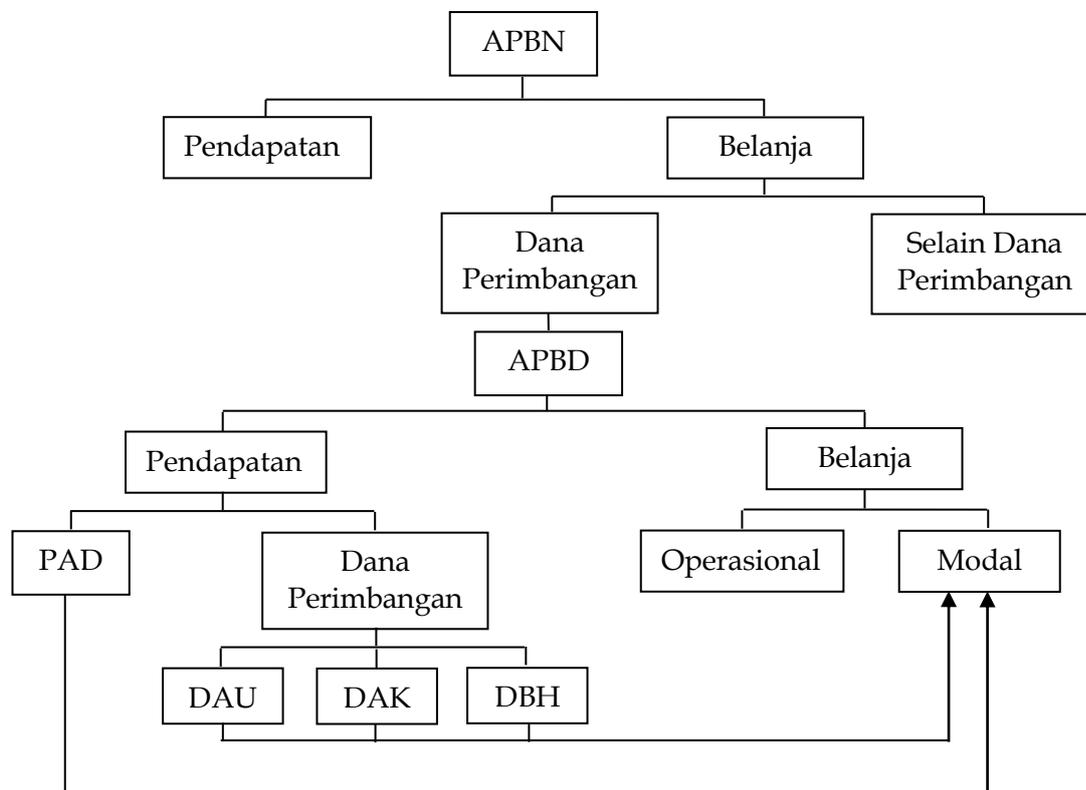
Dana bagi hasil adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (3) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari (1) Kehutanan (2) Pertambangan umum (3) Perikanan (4) Pertambangan minyak bumi (5) Pertambangan gas bumi (6) Pertambangan panas bumi.

### Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan. Menurut Putro dan Pamudji (2010) indikator belanja modal dapat diukur dengan:

Belanja modal = Belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi dan jarangan + belanja aset lainnya

### Rerangka Pemikiran



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### Perumusan Hipotesis

#### Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan

belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik. Santosa dan Rofiq (2013) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Oktora dan Pontoh (2013) berpendapat bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Setiyani (2009) berpendapat bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Nuarisa (2012) berpendapat bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Santosa dan Rofiq (2013) menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal**

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah yang disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Wandira (2012) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Setiawan (2015) DBH tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data Laporan Realisasi APBD pada seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, serta rentang tahun selama lima tahun yaitu tahun 2010-2014.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Sekaran (2006) Sampel adalah sub kelompok atau bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua populasi dipergunakan sebagai sampel.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi. Dalam metoda pengumpulan data ini, data yang dipergunakan yaitu data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang telah dipublikasikan melalui laporan keuangan tiap Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur dari tahun 2010-2014. Data sekunder yang diperoleh berupa realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal. Data sekunder tersebut diperoleh dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan variabel dependen, belanja modal mencakup pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan asset tak berwujud. Belanja Modal tersebut diukur dengan melihat nilai Belanja Modal yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

#### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel independen. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diukur berdasarkan nilai PAD yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

#### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan variabel independen. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut diukur berdasarkan nilai DAU yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

#### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah variabel independen. DAK dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut diukur

berdasarkan nilai DAK yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah variabel independen. DBH bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana bagi hasil yang merupakan bagian Daerah yang disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut diukur berdasarkan nilai DBH yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Pengujian Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini mempunyai distribusi normal atau tidak. Karena distribusi normal menjadi dasar dalam statistik inferen dan model regresi yang baik yaitu model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian untuk mendeteksi normalitas data dapat melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan cara menganalisis plot grafik histogram dan *normal probability plot*. Uji statistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*, pedoman yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal dan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal.

##### **Uji Multikolinearitas**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan korelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance value*  $> 0,01$  dan  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006).

##### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Alat analisis yang digunakan adalah uji *Durbin-Watson*. Untuk mendeteksi pengujian autokorelasi dapat menggunakan tabel *Durbin-Watson* (Santoso, 2001) sebagai berikut: (1) Angka D-W di bawah  $-2$  berarti terdapat autokorelasi positif (2) Angka D-W diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi (3) Angka D-W di atas  $+2$  berarti terdapat autokorelasi negatif.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-PRED dengan residual S-RESID, dimana sumbu Y adalah  $Y$  yang telah diprediksi dan sumbu X adalah ( $Y$  yang diprediksi -  $Y$  sesungguhnya). Apabila titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model

tersebut layak dipakai. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### **Analisis Regresi Berganda**

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal (BM). Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3DAK + \beta_4DBH + e$$

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi  $R^2$  merupakan ukuran untuk menguji seberapa jauh model regresi mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen dengan memiliki nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara nol (0) dan satu (1). Semakin besar nilai  $R^2$  atau mendekati angka satu, maka variabel independen mampu menjelaskan bahwa terdapat adanya pengaruh atau hubungan untuk mendeteksi koefisien variabel dependen dan semakin kecil nilai  $R^2$  maka variabel ini tidak mampu menjelaskan hubungan variabel dependen karena keterbatasan dari model regresi itu sendiri.

#### **Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)**

Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*) atau yang dapat disebut dengan uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen sesuai sebagai variabel penjelas terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.

#### **Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Provinsi Jawa Timur**

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa seluas 47.922 km<sup>2</sup>, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat pada tahun 2010 yaitu 37.476.757 juta jiwa, dengan kepadatan 784 jiwa/km<sup>2</sup>. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi di Negara Indonesia, mempunyai system pemerintahan yang sama dengan Provinsi-provinsi yang lain. Unit pemerintahan yang dikoordinir oleh provinsi secara langsung adalah Kabupaten/Kota. Masing-masing Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan suatu kecamatan terbagi habis dalam beberapa desa. Provinsi Jawa Timur terbagi habis menjadi 662 kecamatan dan 8.506 Desa/Kelurahan. Jika dilihat dari komposisi jumlah kecamatan dan desa, kabupaten Malang mempunyai jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 33 kecamatan. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan

Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normal *Kolmogrov-Smirnov*. Menurut metode ini jika suatu variabel memiliki statistik *Kolmogrov-Smirnov* signifikan ( $p > 0,05$ ) maka variabel tersebut memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai *asympt sig*  $0,400 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel penelitian telah memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05.

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolienaritas dalam model regresi dapat dilihat jika nilai *tolerance value*  $> 0,10$  dan mempunyai nilai *VIF*  $< 10$  maka tidak ada multikolienaritas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, dan nilai *VIF* dari semua variabel besar lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Dari uji *Durbin-Watson* (DW) diketahui diperoleh nilai sebesar 1,715 sehingga dapat disimpulkan bahwa data uji *Durbin-Watson* yaitu sebesar 1,715 terletak diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada autokorelasi di antara keempat variabel independen tersebut.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada varian variabel dalam model regresi yang tidak sama (konstan) dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan garfik *scatterplot* menunjukkan bahwa semua titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y serta tidak menunjukkan pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal. Berikut hasil dari analisis regresi berganda:

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,598	0,294		0,462	0,000
1 PAD	0,325	0,047	0,473	6,940	0,000
DAU	0,530	0,105	0,372	5,068	0,000
DAK	0,135	0,095	0,143	1,791	0,027
DBH	0,258	0,085	0,156	2,061	0,031

a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2015.

Dari hasil pengujian pada tabel 1 diatas yang diinterpretasi adalah nilai kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta ( $\alpha$ ) dan baris selanjutnya menunjukkan kostanta variabel independen. Dengan demikian dapat disusun persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$BM = 0,598 + 0,325PAD + 0,530DAU + 0,135DAK + 0,258DBH + e$$

### Pengujian Hipotesis

#### Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati satu, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga  $R^2$  mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,835 <sup>a</sup>	0,697	0,691	0,32155

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: data Sekunder diolah, 2015.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,697 atau 69%. Artinya perubahan yang terjadi pada variabel Belanja Modal (BM) sebesar 69% mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Uji kesesuaian model digunakan untuk menguji ketepatan model penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Hasil uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Kesesuaian Model**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,094	4	11,024	6,616	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	19,128	185	0,103		
	Total	63,222	189			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

Sumber: data Sekunder diolah, 2015.

Berdasarkan hasil uji Anova atau uji kelayakan model pada tabel 3 terlihat bahwa nilai F sebesar 6,616 dan nilai sig sebesar 0.000. Dengan menggunakan tingkat  $\alpha$  0,05 atau 5%, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  terdukung. Penolakan  $H_0$  dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan untuk menguji secara parsial variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Pengaruh dari masing-masing variabel PAD, DAU, DAK, DBH terhadap BM dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikansi. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error				
		Beta					
1	(Constant)	0,598	0,294		0,462	0,000	
	PAD	0,325	0,047	0,473	6,940	0,000	Berpengaruh
	DAU	0,530	0,105	0,372	5,068	0,000	Berpengaruh
	DAK	0,135	0,095	0,143	1,791	0,027	Berpengaruh
	DBH	0,258	0,085	0,156	2,061	0,031	Berpengaruh

a. Dependent Variable: BM

Sumber: data Sekunder diolah, 2015.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Santosa dan Rofiq (2013), dan Nuarisa (2012). Yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Jika pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut dengan mempertimbangkan PAD yang diterima (Nuarisa, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak PAD yang diterima oleh daerah maka semakin banyak pula daerah dapat mengalokasikan dana untuk anggaran belanja modal daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri. Meskipun pendapatan asli daerah jumlahnya sedikit tetapi pendapatan asli daerah sangat berpengaruh, tidak hanya untuk alokasi belanja modal tetapi juga dapat digunakan untuk belanja operasional. Selain itu, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima mencerminkan kemandirian daerah, yang artinya daerah tersebut semakin tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat. Maka dari itu, hendaknya Pemerintah Daerah lebih terpacu lagi untuk lebih memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Nuarisa (2012), Santosa dan Rofiq (2013), serta Oktora dan Pontoh (2013). Yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan belanja modal, karena dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2009), dan Oktora dan Pontoh (2013). Yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Contohnya untuk pembangunan puskesmas di daerah ataupun untuk pembangunan sekolah dan untuk perbaikan jalan raya yang rusak. Jadi bisa dikatakan bahwa ada keterkaitan antara Dana Alokasi Khusus dengan belanja modal. Dan jika ditinjau dari fungsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diatas, maka dapat dipastikan bahwa memang dana alokasi khusus lebih difokuskan untuk pengalokasian belanja modal suatu daerah.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh yang berarti apabila dana bagi hasil yang diterima oleh daerah tinggi, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2012). Yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana bagi hasil adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wandira (2012) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal (4) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal, peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Peneliti hanya menggunakan satu Provinsi saja, yaitu Jawa Timur. Dengan menggunakan variabel yang sama, sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan Provinsi lain. Sehingga dapat membandingkan pengaruh dari variabel tersebut antara satu Provinsi dengan Provinsi lain. Sehingga hasil penelitian yang didapat memiliki cakupan yang lebih luas (2) Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen non-keuangan seperti luas wilayah dan jumlah penduduk.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, P.H. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali). *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- \_\_\_\_\_. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada kabupaten dan kota se Jawa - Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanudin. Makasar.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Th. XIII/25*.
- Hariato, D. dan H.A. Priyo. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nuarisa, S.A. 2012. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Oktora, F.E. dan W. Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Accountability*. Vol. 2 (1).
- Putro, N.S. dan S. Pamudji. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, BPFE UGM: 33-40*. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126). Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Santosa, A.B. dan M.A. Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 2 (2).
- Santoso, S. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

- Setiawan, A.W. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta periode 2007-2013. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiyani, S.E. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2007. *Tesis*. Universitas Stikubank Semarang.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Sumarmi, S. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmenipa UPY, Vol 4*.
- Usman, S. dkk. 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Lembaga Penelitian SMERU.
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Wandira, A.G. 2012. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 (1).
- Yuwono, S., T.A. Indrajaya., Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.